

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) SAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARA JAWA DAN BALIKPAPAN (SASAMBA)

Muhammad Fajerianoor¹

Abstrak

Muhammad Fajerianoor, NIM 0902025112 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendiskripsikan bagaimana implementasi Keputusan Presiden (Keppres) nomor 12 tahun 1998 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Balikpapan (Sasamba). Melihat perkembangan yang terjadi di Badan Pengelola Kapet Sasamba (BP Kapet Sasamba) sebagai sebuah lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana kegiatan di wilayah Kapet Sasamba dari awal berdirinya hingga akhir pembubarannya.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Kapet Sasamba jalan Tengawang No. 5 Samarinda, Kalimantan Timur. Kapet Sasamba merupakan kebijakan dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai upaya pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Dalam melaksanakan kebijakan ini pemerintah membentuk Badan Pengelola Kapet Sasamba namun dalam perjalanannya lembaga ini tidak memberikan kemajuan sebagaimana yang diharapkan, beberapa kali lembaga ini mengalami perubahan dalam tugasnya, mulai dari tugas pengendalian dan pengawasan hingga tugas sebagai fasilitasi dan koordinasi. Perubahan dikarekan adanya perubahan pergantian pemerintahan, timbulnya semangat otonomi daerah hingga tugas ini tumpang tindih kewenangan, sehingga Badan Pengelola Kapet Sasamba harus dibubarkan.

Kata Kunci : Implementasi, Keppres No 12 Tahun 1998, Kapet Sasamba,

PENDAHULUAN

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dapat didefinisikan sebagai kawasan andalan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang memiliki potensi ekonomi unggul yang saling berkaitan, sehingga pembangunannya dapat dilakukan secara simultan. Lebih lanjut diasumsikan bahwa kawasan andalan berpotensi untuk lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan kawasan yang lain. Pertumbuhan yang terjadi di kawasan

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fajerihandil@gmail.com

andalan diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan kawasan belakangnya (*hinteriandnya*). Pembangunan kawasan andalan secara bersamaan akan saling mendukung dan mempunyai sinergi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi regional.

Konsep operasional pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) menerapkan kriteria kawasan andalan sebagai berikut :

1. Kawasan yang mempunyai kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi disekitar kawasannya, maka kawasan andalan harus mempunyai sektor ekonomi unggulan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi sektor lain di daerahnya sendiri maupun di daerah belakangnya (*hinteriandnya*).
2. Kawasan yang mempunyai keterkaitan kegiatan ekonomi dengan daerah belakangnya (*hinteriandnya*) baik keterkaitan kedepan maupun keterkaitan kebelakang engan daerah pendukungnya.
3. Kawasan yang mempunyai prasarana infrastruktur fisik maupun non fisik yang relatif lebih baik dan lebih lengkap.

Pendekatan pertumbuhan wilayah melalui pembentukan Kawasan Kawasan Ekonomi Terpadu (Kapet) adalah upaya untuk memacu pertumbuhan dan menghilangkan kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Kesenjangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu permasalahan yang terjadi sampai saat itu. Kesenjangan yang terjadi tersebut akibat ketidak berpihakan pemerintah pusat dan juga diakibatkan oleh sistem pembangunan yang dilaksanakan saat itu lebih bersifat sektoral, sentralistik dan kurang memperhatikan wilayah. Kurangnya percepatan pembangunan diwilayah tersebut diidentifikasi karena kurangnya modal atau investasi sebagai akibat adanya kegagalan pasar dan sekaligus kegagalan pemerintah. Untuk mengatasinya, Pemerintah Pusat mengupayakan percepatan pembangunan melalui pendekatan kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat setempat melalui percepatan dan maksimalisasi pertumbuhan ekonomi.

Secara garis besar ada tiga hal yang ditawarkan dalam kebijakan Kapet Sasamba, yakni: (1) keterpaduan perencanaan dan program antar sektor dan antara sektor pemerintah dan sektor swasta (2) keterpaduan dalam pelayanan perijinan dan (3) keterpaduan dalam pemberian insentif-insentif khusus kepada wilayah yang dikembangkan (Keppres Nomor 12 tahun 1998).

Sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1998, Kapet Sasamba dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam rangka memberikan peluang kepada dunia usaha untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur Kapet Sasamba memberikan kemudahan-kemudahan kepada para pengusaha untuk melakukan kegiatan ekonominya di kawasan Kapet Sasamba melalui pengendalian dan pengawasan pembangunan

industri, perdagangan dan jasa, pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas, perijinan usaha berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi terkait dalam rangka pelayanan satu atap yang dilakukan oleh Badan Pengelola Kapet Sasamba dan fokus mengembangkan kawasan Kapet Sasamba ada tiga yaitu : (1) Pengembangan ekonomi disektor primer (2) pengembangan ekonomi disektor sekunder (3) pengembangan ekonomi disektor tertier. (BP Kapet Sasamba).

Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah : Bagaimana implementasi Keputusan Presiden (Keppres) nomor 12 tahun 1998 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba) ?

Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan mendiskripsikan implementasi Keputusan Presiden (Keppres) nomor 12 tahun 1998 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba).
- 2) Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana Bagaimana Tugas Badan Pengelola Kapet Sasamba (BP Kapet) dalam mengembangkan kawasan Kapet Sasamba

Manfaat penelitian

A. Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan informasi dan bahan acuan bagi para peneliti lain yang mengadakan penelitian dibidang yang sama.
- b. Sebagai bahan untuk menambah wawasan pola pikir dan pengembangan keilmuan khususnya dibidang ekonomi dan politik.

B. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi bagi pemerintah daerah, instansi-instansi pemerintah ataupun swasta

KERANGKA DASAR TEORI

Implementasi

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Wahab, 2001:65) Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak

pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Wilayah dan Kawasan

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional (Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992). Sedangkan menurut Glasson (2005) wilayah merupakan *area continue* yang terletak antara tingkat lokal dan tingkat nasional. Dinyatakan pula, pendefinisian wilayah itu sendiri bergantung pada tujuan analisis atau tujuan perumusan kebijakan pembangunan wilayah yang akan disusun.

Rustiadi dkk (2005) mendefinisikan wilayah sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana bagian-bagian dari wilayah tersebut satu sama lain berinteraksi secara fungsional. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa tidak ada batasan yang spesifik dari luasan suatu wilayah. Batasan yang ada lebih bersifat "*meaningful*" untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian maupun evaluasi. Dengan demikian, batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis.

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet)

Sebagai upaya pengembangan Kawasan Indonesia Timur dalam rangka mengejar ketertinggalannya terhadap Kawasan Indonesia Barat, pemerintah telah memberikan perhatian terhadap Kawasan Indonesia Timur. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu mengadopsi konsep growth centers (growth pole), yaitu menciptakan dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, berupa satu kawasan andalan prioritas mewakili masing-masing provinsi. Kawasan ini didukung oleh kegiatan sektor/komoditi unggulan, yang berupa potensi sumber daya lokal, yang diharapkan menjadi prime mover pengembangan provinsi yang bersangkutan (Prasetya dan Hadi 2000).

Menurut Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996, kemudian disempurnakan oleh Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998 yang selanjutnya diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000. Pengertian Kapet adalah suatu wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki potensi untuk cepat tumbuh, dan atau
- b. Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan
- c. ekonomi di wilayah sekitarnya
- d. Memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya.

Kapet Sasamba

Kawasan Penembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba) Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 12 tahun 1998. Bahwa dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam rangka lebih memberikan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta secara lebih luas di kawasan timur Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai upaya pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kalimantan Timur.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono 1999).

Sehingga persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan terus berlanjut. Pertumbuhan adalah peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yaitu tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto/Produk Nasional Bruto pada suatu tahun tertentu dibagi dengan tingkat pertumbuhan penduduk, atau dibutuhkannya. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDRBt) dengan PDRB tahun sebelumnya (PDRB t-1)

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1}}{\text{PDRBt-1}} \times 100\%$$

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor penting sebagai berikut (Arsyad, 1999)

Definisi Konsepsional

Impelementasi Kepper No 12 tahun 1998 adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Kapet Sasamba demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomer 12 tahun 1998, berdasarkan kawasan geografis pusat pertumbuhan ekonomi dengan batas-batas tertentu yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi disekitarnya, kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan menuntuskan ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif –kualitatif. Menurut Sugiyono (2006:6) Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. (dalam Azwar, 2009: 5)

Fokus Penelitian

- 1) Tugas Badan Pengelola Kapet Sasamba (BP Kapet Sasamba) Sebagai :
 1. Pengendalian dan
 2. Pengawasan Kawasan Pengembangan ekonomi Terpadu (Kapet) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba).
- 2) Tugas Badan Pengelola Kapet Sasamba (BP Kapet Sasamba) Sebagai Fasilitasi dan koordinasi Kawasan Pengembangan ekonomi Terpadu (Kapet) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba).

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelola Kapet Sasamba jalan Tengkawang No. 5 Samarinda, Kalimantan Timur.

Sumber data

Menurut Mohammad Hasan (2005 : 43) sumber data dapat digolongkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti, atau ada hubungannya dengan yang di teliti. Sedangkan data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instansi dan perpustakaan.

Dalam penelitian ini untuk pemilihan *informan* penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dimana dalam metode ini peneliti menentukan sendiri sample-sample dari populasi yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang diteliti dan menguasai dibidang yang bersangkutan masalah yang diteliti (*key informan*). Menurut Sugiyono (2007:53) bahwa teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita inginkan, sebagai penguasa atau ahli di bidangnya sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Berdasarkan penjelasan tersebut yang menjadi *key informan* dan *Informen* pengumpulan data adalah :

- a. *Key Informan* yaitu Wakil Ketua Badan Pengelola Kapet Sasamba karena dianggap penulis mengetahui segala kegiatan yang berada Kapet Sasamba.
- b. *Informan*, penulis mempertimbangkan bahwa *informan* yang dipilih tersebut adalah dianggap paling tahu mengenai Kapet Sasamba. Untuk itu penulis mengambil *informan* yang terdiri dari Direktur-Direktur Badan Pengelola Kapet Sasamba yang meliputi Direktur Umum, Direktur Perencanaan, Direktur Pembangunan dan Direktur Pengembang Usaha, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kalimantan Timur, Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Teknik pengumpulan data

Penulis menggunakan beberapa teknik Pengumpulan data yaitu:

- 1) Penelitian Pustaka (Library Research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian skripsi ini.
- 2) Penelitian Lapangan (Field Work Research)
 - a) Observasi
 - b) Wawancara (Interview).
 - c) Dokumen(dalam Satori dkk, 2009)

Teknik analisis data

Melakukan Analisis data maksudnya adalah menetapkan tahap-tahap, langkah-langkah kegiatan terhadap data yang sedang dan sudah dikumpulkan, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan. Pada prinsipnya analisis data merupakan sejumlah aktifitas yang dilakukan oleh peneliti ketika proses pengumpulan data atau informasi berlangsung, sampai pada penarikan kesimpulan berupa konsep atau hubungan antar konsep (dalam Hamidi, 2008).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Deskriptif Kualitatif melalui data sekunder. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Satori dkk, 2009) bahwa analisis data deskriptif kualitatif terdiri atas empat Tahap yaitu :

1. Tahap pengumpulan (Data Collection)
2. Tahap reduksi data (Data Reduction)
3. Tahap penyajian data (Data Display)
4. Tahap Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verifying)

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kapet Sasamba merupakan salah satu Kapet yang ada di wilayah Timur Indonesia tepatnya di Provinsi Kalimantan timur. Kapet Sasamba ditetapkan melalui keputusan presiden (Keppres) nomor 12 tahun 1998. Kapet Sasamba wilayahnya meliputi kota Samarinda, sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu kecamatan Sanga-Sanga, Muara Jawa, Samboja dan Loa Janan serta kota Balikpapan.

Kondisi Geografis Kapet Sasamba

Kapet Sasamba terdiri atas 2 kota yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan dan 4 kecamatan di dalam Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda dengan luas wilayah 668,00 Km² atau 66.800 Ha, memiliki 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Samarinda Kota, Sambutan, Loa Janan Ilir, dan Sungai Pinang. 4 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Sanga-Sanga, Muara Jawa, Samboja dan Loa Janan dengan luas wilayah 2.678,00 Km² atau 267.800 Ha dan Kota Balikpapan dengan luas wilayah 503,30 Km² atau 50.330 Ha dengan demikian total luas wilayah Kapet Sasamba adalah 3.849,30 Km² atau 384.930 Ha. Memiliki 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah dan Balikpapan Barat.

Batas-batas wilayah KAPET Sasamba sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Kutai Kartanegara dan Selat Makassar.
- Sebelah Barat : Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Penajam Paser Utara.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Penajam Paser Utara dan Selat Makassar.
- Sebelah Utara : Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kecamatan samarinda utara memiliki 5 kelurahan yaitu Sempaja Selatan, Lempake, Sungai Siring, Sempaja Utara dan Tanah Merah dengan jumlah penduduk berjumlah 79.971 orang yang terdiri dari 41.628 laki-laki dan 38.343 perempuan. Luas wilayah Kecamatan samarinda utara kurang lebih 250,1 km dan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Sungai Pinang
3. Sebelah Barat : Kecamatan Samarinda Ulu
4. Sebelah Timur : Kabupaten Kutai Kartanegara

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Keputusan Presiden (Keppres) nomor 12 tahun 1998 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba).

Hasil penelitaian dan pembahasan implementasi Keputusan Presiden (Keppres) nomor 12 tahun 1998 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba) akan mengarahkan pada tugas Badan Pengelola Kapet Sasamba (BP Kapet Sasamba) sebagai sebuah organisasi yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana kegiatan di wilayah Kapet Sasamba. Pada perkembangannya Badan Pengelola Kapet Sasamba mengalami berbagai macam permasalahan-permasalahan terkait dengan tugasnya sebagai pelaksana kegiatan di wilayah Kapet Sasamba.

Selama kurun waktu 16 tahun keberadaannya Badan Pengelola Kapet Sasamba menjalankan kegiatannya beberapa kali harus mengalami perubahan-

perubahan tugas dari tugas Badan Pengelola Kapet Sasamba sebagai pengendalian dan pengawasan Kapet Sasamba hingga tugasnya hanya sebagai fasilitasi dan koordinasi baik dengan pemerintah maupun swasta terkait dengan potensi kawasan yang ada di wilayah Kapet Sasamba, hingga akhirnya Badan Pengelola Kapet Sasamba harus dibubarkan di akhir tahun 2014.

Tugas Badan Pengelola Kapet Sasamba (BP Kapet Sasamba) Sebagai Pengendali dan Pengawas Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba)

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba) dari sisi lokasi dirancang sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis secara geografis yang diandalkan untuk cepat tumbuh karena memiliki keuntungan lokasi serta memiliki komoditas-komoditas unggulan yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya, disamping itu juga memiliki peluang investasi yang sangat besar. Untuk mengendalikan dan mengawasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba) sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 12 tahun 1998 adalah Badan Pengelola Kapet Sasamba (BP Kapet Sasamba). Tugas Badan Pengelola Kapet Sasamba (BP Kapet Sasamba) diawal memiliki tugas dibidang pengendalian dan pengawasan terhadap Kapet Sasamba.

Pengendalian

Tugas Badan Pengelola Kapet Sasamba Sebagai Pengedali meliputi :

1. Melaksanakan Rencana Induk Pengembangan Kapet Sasamba yang ditetapkan oleh Tim Pengarah.
2. Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan industri, perdagangan dan jasa di wilayah Kapet Sasamba termasuk pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya.
3. Memberikan dan mengendalikan perijinan usaha berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi terkait dalam rangka pelayanan satu atap.

Pengendalian yang dilakukan oleh Badan Pengelola Kapet Sasamba yang bersangkutan dengan pengembangan kawasan dan pengendalian ijin-ijin usaha yang berada di wilayah Kapet Sasamba serta pengendalian pengembangan pembangunan industri, perdagangan dan jasa, termasuk juga pengembangan sarana, prasasana dan fasilitas penunjang kawasan Kapet Sasamba. Sebagaimana yang diutarakan oleh Direktur Umum BP Kapet Sasamba Bapak H. Ambo Tola A. ketika penulis melakukan wawancara di kantornya, berikut kutipannya :

“BP Kapet Sasamba memang pada awalnya mengendalikan semua perijinan sesuai dengan yang ada di dalam Keppres itu, biasanya mereka kesini menginginkan keringanan dalam hal pajak, tapi itu dulu di awal-awal aja de, sekarang kami tidak lagi melakukan hal itu” (wawancara 11 Januari 2015)

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Bapak Drs. H Mulyadi selaku selaku Direktur Pengembangan Usaha Badan Pengelola Kapet Sasamba.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat melihat bahwa pengendalian yang dilakukan oleh Badan Pengelola Kapet Sasamba adalah pengendalian ijin-ijin yang ada di wilayah Kapet Sasamba dan perencanaan pengembangan pembangunan kawasan Kapet Sasamba sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan. Pengendalian yang dilakukan oleh Badan Pengelola Kapet Sasamba merupakan upaya memberikan pertimbangan teknis bagi permohonan perizinan kegiatan investasi pada Kapet Sasamba agar pengembangan wilayah yang ada di kawasan Kapet Sasamba dapat terpadu dan terarah.

Pengawasan

Sedangkan tugas pengawasan Badan Pengelola Kapet Sasamba meliputi : Pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah Kapet Sasamba berdasarkan rancana induk pengembangan yang telah ditetapkan sesuai rencana tata ruang wilayah. Badan Pengelola Kapet Sasamba melakukan pengawasan melalui proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, sesuai dengan rencana induk pengembangan Kapet Sasamba. pengawasan ini dilakukan agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan badan pengelola Kapet Sasamba dapat sesuai dengan rancangan pengembangan pembangunan di wilayah Kapet Sasamba sehingga akan jelas capaian-capaian yang telah ditargetkan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. H Mulyadi selaku selaku Direktur Pengembangan Usaha Badan Pengelola Kapet Sasamba yang mengutarakan :

“Pengawasan yang dulu kami lakukan itu pengawasan yang mengarah pada percepatan pengembangan Kapet, hanya di wilayah Kapet Sasamba saja yang kami awasi, sudah sesuai dengan rancana tidak, perusahaan yang kita berikan rekomendasi jalan apa tidak ini yang kami lakukan dulu. Pengawasan ini dilakukan setiap tahun dengan memberikan laporan-laporan perkembangannya. memang dulunya begitu kalau sekarang cuman laporan faskor aja lagi” (wawancara 11 Januari 2015)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis informasi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Kapet Sasamba berupa pengawasan kegiatan pengembangan yang ada di wilayah Kapet Sasamba untuk melihat sejauh mana perkembangan yang telah dicapai dan apakah sudah sesuai dengan rencana induk pengembangan Kapet Sasamba.

Kapet Sasamba memberikan kemudahan kepada pengusaha yang akan melakukan kegiatan usaha di dalam Kapet Sasamba dengan memberikan perlakuan perpajakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 9 tahun 1998 kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 20

tahun 2000 dan kemudian dirubah dengan penyempurnaan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 147 tahun 2000 tentang perlakuan perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet). Selain perlakuan perpajakan Kapet juga memberikan perlakuan perpajakan tambahan tidak dipungutnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah,

Dengan pemberin kemudahan-kemudahan tersebut diharapkan dapat menarik investor untuk melakukan kegiatan ekonomi di Kapet Sasamba, ada beberapa Perseroan Terbatas (PT) yang diawal-awal berdirinya Kapet mendapatkan kemudahan-kemudahan pepajakan dari Badan Pengelola Kapet Sasamba diantara lain:

1. PT. Murni Gas Raya
2. PT. Bangun Kalimantan
3. PT. Anugrah Bara Kaltim
4. PT. Menamas Mitra Energi
5. PT. Senong Corporindo
6. PT. Nunukan Sarana Jaya

Sumber Data : BP Kapet Sasamba investasi tahun 2002

Dengan kewenangan yang diberikan kepada Badan Pengelola Kapet Sasamba Perusahaan-prusahaan tersebut mendapatkan kekhususan dibidang koordinasi dan percepatan perizinan dengan “Zero Cost” memperoleh insentif perpajakan. Namun baru beberapa tahun umur Kapet Sasamba kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada dunia usaha sebagaimana yang telah dijabarkan diatas tidak dapat dipertahankan pemerintah dengan alasan bahwa Negara Indonesia mengalami krisis ekonomi nasional yang menempatkan swasta dan pemerintah harus menghadapi persoalan keuangan yang mendasar serta alasan bahwa setiap kawasan harus berkompetisi secara sehat tanpa perlu keistimewaan-keistimewaan yang ada didalamnya. Hal ini senada dengan apa yang diutaran oleh Bapak Drs. H. Mulyadi selaku Direktur Pengembangan Usaha Badan Pengelola Kapet Sasamba ketika penulis melakukan wawancara di kantornya, berikut kutipan wawancaranya :

“Bahwa tugas Badan Pengelola Kapet Sasamba awalnya memang sangatlah besar karena memberikan banyak kemudahan-kemudahan khususnya pada kemudahan insentif, jadi setiap perusahaan yang mau membangun disini tidak dikenakan pajak, namun setelah itu ditarik lagi kepusat karena pada saat itu kita mengalami krisis ekonomi” (wawancara tanggal 11 Januari 2015).

Hal yang senada juga diutarakan oleh Wakil Ketua Badan Pengelola Kapat Sasamba Bapak Erik Nursahramdani.

Dari hasil wawancara ini penulis dapat melihat bahwa alasan utama dari pencabutan kemudahan-kemudahan yang diberikan di wilayah Kapet Sasamba dikatenakan krisis ekonomi di Negara Indonesia. Namun sebenarnya penulis melihat bukan hanya hal itu saja yang menjadi penyebab dicabutnya kemudahan-kemudahan pada Badan Pengelola Kapet Sasamba, pelimpahan wewenang dari

pusat ke daerah yang diserahkan kepada Badan Pengelola Kapet Sasamba sangatlah berat, pertama. karena Kapet Sasamba memiliki cakupan wilayah yang sangat luas sehingga pemberian kemudahan-kemudahan kepada dunia usaha akan mengurangi pedapatan negara, kedua. Kewenangan Badan Pengelola Kapet Sasamba dapat menimbulkan konflik kewenangan dengan instansi daerah, ketiga. Munculnya semangat desentralisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Novi Julfiansyah selaku staf bidang pelayanan perijinan satu pintu Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kalimantan Timur, yang mengungkapkan :

“Keberadaan Kapet Sasamba itu bagaikan Negara dalam Negara karena kenapa Kapet Sasamba punya Badan Pengelola Kapet Sasamba yang tugasnya menyelenggarakan kegiatan di wilayah Kapet Sasamba mulai dari ijin-ijin, pengembangan kawasan dan lain lain sedangkan di daerah juga ada yang menangani tu, Kapet Sasamba ini kan luas mencakup dua Kota dan satu Kabupaten jadi ya da gap lah antara Badan perijina yang ada di Kabupaten/Kota sama Badan Pengelola Kapet Sasamba apalagi dengan semangat otonomi daerah ini kan dimana pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya sendiri” (wawancara 30 Maret 2015)

Dari hasil wawancara ini penulis dapat mengambil informasi bahwa ada dua Badan yang menangani tugas yang sama dan dengan adanya semangat otonomi daerah yang mengakibatkan Pencabutan akan kemudahan-kemudahan tentang perlakuan perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) hal ini ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nomor 59/SK/2004 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Pengendalian Penanaman Modal di Dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) kepada Ketua Badan Pengelola Kapet.

Tugas Badan Pengelola Kapet Sasamba (BP Kapet Sasamba) Sebagai Fasilitasi dan Koordinasi

Kebijakan pemerintah dalam mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah terus dilaksanakan melalui berbagai program. Program pengembangan kawasan pengembangan ekonomi terpadu merupakan salah satu program yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang mensinergikan dan mengkoordinasikan berbagai input (SDM, SDA, kebijakan dll) dalam proses pembangunan wilayah yang dikenal pengembangan wilayah.

Upaya pengembangan Kapet adalah untuk mengembalikan nilai strategis kawasan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan (*sustainability*). Dalam hal ini diperlukan suatu kebijakan yang terpadu, sinergis dan komperhensif oleh pemerintah pusat dan daerah dalam

upaya mendorong kawasan tersebut untuk dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat.

Berikut ini merupakan petikan wawancara dengan Bapak Drs. H. Mulyadi selaku Direktur Pengembangan Usaha Badan Pengelola Kapet Sasamba ketika penulis menemui kantornya, berikut ini petikan wawancaranya :

“Kalau tugas BP Kapet Sasamba sekarang ini hanya memberikan fasilitasi dan melakukan koordinasi kepada pemerintah maupun pihak swasta, dengan tugas ini kami hanya melakukan koordinasi dengan dinas-dinas, instansi pemerintah atau pun swasta terkait dengan pengembangan kawasan Kapet Sasamba. kami juga sering menghadiri undangan-undangan rapat yang berkenaan dengan kawasan Kapet Sasamba” (wawancara 11 Januari 2015).

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis kepada Bapak Drs. H. Mulyadi selaku Direktur Pengembangan Usaha Badan Pengelola Kapet Sasamba tugas Badan Pengelola Kapet Sasamba merupakan kegiatan yang memberikan informasi dan menggali informasi mengenai rencana pengembangan kawasan Kapet Sasamba, berupa fasilitasi dan kegiatan koordinasi kepada semua pihak.

Dalam melakukan kegiatan fasilitasi dan koordinasi Badan Pengelola Kapet Sasamba melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, fasilitasi dan koordinasi dalam rangka membangun koneksi dan keselarasan pembangunan yang ada di wilayah Kapet Sasamba, pada perjalannya tugas badan pengelola Kapet Sasamba sebagai Fasilitator dan Koordinasi yang bertujuan untuk mendatangkan investasi yang besar di Kawasan Kapet Sasamba. Hal ini disampaikan oleh Bapak Drs. H. Mulyadi selaku Direktur Pengembangan Usaha Badan Pengelola Kapet Sasamba berikut ini penuturannya :

“Badan Pengelola Kapet Sasamba melakukan kegiatan Faskor adalah untuk mendatangkan investasi ke wilayah Kapet Sasamba dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mempromosikan keunggulan-keunggulan kawasan Kapet Sasamba.” (wawancara 11 Januari 2015)

Dari hasil wawancara ini penulis melihat bahwa fasilitas dan koordinasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Kapet Sasamba adalah untuk mendatangkan investasi ke wilayah Kapet Sasamba. Akan tetapi kegiatan fasilitasi dan koordinasi ini sebenarnya juga dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah yang lain misalnya Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kalimantan Timur yang juga melakukan hal yang sama, sehingga terdapat dua bahkan lebih instansi-instansi pemerintah yang melakukan kegiatan serupa.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Sanusi Saudek bagian kerjasama Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kalimantan Timur, berikut ini penjelasannya :

“Kalau kami melakukan promosi dan koordinasi kepada semua pihak agar dapat menarik investor untuk melakukan investasi ke Kalimantan Timur, memang kegiatan ini juga dilakukan oleh

Badan Pengelola Kapet Sasamba tapi mereka hanya melakukan promosi kawasan Kapet Sasamba saja kalau kami semua wilayah di Kalimantan Timur. Walaupun Badan Pengelola Kapet Sasamba melakuakan promosi yang sama dengan kami hal itu tidak ada masalah dengan kami, mereka kan menggunakan dana dari pusat sedangkan kami dari dana pemerintah daerah, ya walaupun sama yang dipromosikan” (wawancara, 30 Maret 2015)

PENUTUP

Kesimpulan

Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba) adalah lembaga yang sudah memiliki dukungan politik, akan tetapi karena ketidakseriusan pemerintah dan kurangnya komitmen perintah dalam membangun wilayah Kapet Sasamba. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi mulai dari awal terbentuknya hingga akhirnya dibubarkannya Badan Pengelola Kapet Sasamba. berbagai hal yang menjadikan Badan Pengelola Kapet Sasamba dibubarkan dikarenakan : (1) Adanya perubahan pergantian pemerintahan (2). Timbulnya semangat otonomi daerah (3). Tumpang tindih kewenangan Badan Pengelola Kapet Sasamba dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada (4). Meningkatkan efektifitas dan epesiensi anggaran Negara dan dalam pelaksanaan urusan pemerintah. Sehingga Badan Pengelola Kapet Sasamba harus dibubarkan. Pembubaran Badan Pengelola Kapet Sasamba adalah suatu langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah melihat dari kinerja dan tugas yang diembannya selama ini.

Pada hakekatnya wilayah Kapet Sasamba merupakan kawasan yang sangat potensial dalam percepatan pembangunan di Kalimantan Timur karena masuk kedalam Kawasan Strategis Nasional (KSN), wilayah kerjasama regional negara-negara ASEAN, yang tergabung dalam : Brunai Darusalam-Indonesia-Malaysia-Philipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), dan juga masuk dalam program *Masterplan* Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Saran

1. Kawasan Strategis Kapet Sasamba merupakan kawasan potensial dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur maka pengelolaan kawasan ini harus dilakukan secara serius dan terintegrasi antar pemerintah. Pemerintah segera membuat semacam Forum Koordinasi dan Komunikasi Pembangunan Kapet Sasamba yang melibatkan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan timur dan Kabupaten/Kota yang termasuk didalam kawasan Kapet Sasamba (Samarinda, Kutai Kartanegara dan Balikpapan) agar perencanaan pembangunan dapat terpadu dan terarah.

2. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap lembaga-lembaga struktural dan non struktural terhadap kinerja masing-masing lembaga agar hal-hal yang terjadi di Badan Pengelola Kapet Sasamba tidak terjadi di lembaga-lembaga yang ada, sehingga efektifitas dan efisiensi anggaran Negara dapat diminimalisir.
3. Kebijakan Kapet Sasamba sangat sulit untuk kembali diterapkan di wilayah Kalimantan Timur sehingga dalam upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan langkah tepat yang harus dilakukan untuk percepatan membangun ekonomi di Kalimantan Timur.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin, 1997. *Evaluasi kebijakan Publik*. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.
- Arsyad, L. (1999) *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Azwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bisri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Arlangga.
- Satori, dkk. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung
- Sukirno, Sadondo. 2006. *Ekonomi Regional : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta : Kencana.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta, Sinar.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan (Problematika dan Pendekatan)*. Jakarta: Salemba Empat
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi

Referensi Internet :

- Setiono, Djoko, 2005, *Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Harapan dan Kenyataan*, Buletin Kawasan, www.bappenas.go.id.
- Poerwanto, Heri, 2004, *Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Harapan dan Kenyataan*, Institut Pertanian Bogor,
- Tumotou.net/pps702_82034/e_d_heripoerwanto.pdf.supplemental result